

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

BUKU :

Hasbullah, Frieda Husni, 2005, “ *Hukum Keperdataan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid II* “, Ind-Hill-Co, Jakarta.

Hernoko, Agus Yudha, 2014, “ *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* “, cetakan ke-4, Prenadamedia Group, Jakarta.

Mansyur, Ali, 2014, “ *Hukum Perdata Perikatan* “, cetakan ke-3, Unissula Press, Semarang.

Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2009, “ *Hukum Jaminan* ”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Pitlo, A, 1949, “ *Het Zakenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek* “, Tjeenk Willink, Zwolle.

Prodjodikoro, Wirjono, 1966, “ *Asas-asas Hukum Perdjandjian* “, cetakan ke-6, Sumur Bandung, Bandung.

-----, 2011, “ *Azas-azas Hukum Perjanjian* “, cetakan ke-9, Mandar Maju, Bandung.

Satrio, J, 1991, “ *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* “, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, “ *Hukum Perdata Hukum Benda* “, cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2014, “ *Aneka Perjanjian* “, cetakan ke-11, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, “ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* “, cetakan ke-34, Pradnya Paramita, Jakarta.

UNDANG-UNDANG :

Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie, Stb. 1847 – 23.

Stb. 1848 – 22.

Burgerlijk Wetboek, Stb. 1874 – 23.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Stb. 1941 – 44.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

PERATURAN PEMERINTAH (PP) :

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG :

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-undang.

PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL :

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA :

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

KONVENSI INTERNASIONAL :

Protocol To The Convention On International Interest In Mobile Equipmnet On Matters Specific To Aircraft Equipment, Cape Town, 16 November 2011.